

**SKRIPSI**

**Novieta Ariyanti**

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN  
DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

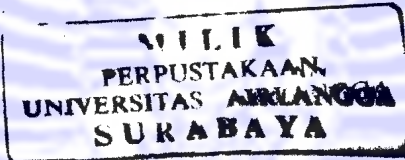
# **PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN KREDIT**

## **SKRIPSI**

Telah diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pembimbing,

Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.  
NIP : 131 878 393



Penyusun,

Novieta Ariyanti  
NIM : 039 910 522 U

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Nasabah debitor sebagai pihak yang membutuhkan kredit atau dana bank, dalam perjanjian kredit memiliki kedudukan yang kurang menguntungkan. Hal ini nampak sejak permohonan kredit nasabah debitor diterima oleh bank, maka pihak bank akan menyodorkan formulir yang hampir seluruh klausulnya telah baku, sedangkan pihak nasabah debitor pada dasarnya tidak punya peluang untuk merundingkan isi klausul. Oleh karena itu klausula tersebut justru dianggap tidak wajar dan memberatkan nasabah debitor. Pihak Nasabah debitor hanya mempunyai kesempatan untuk menerima atau tidak menerima klausula tersebut ( *take it or leave it* ). Pada umumnya dalam perjanjian ini pihak nasabah debitor dapat menyetujui, hal ini disebabkan nasabah debitor dihadapkan pada keadaan yang sangat menyulitkan dirinya apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka proyeknya akan terkatung - katung. Adapun perkembangan mengenai penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan yang berkaitan dengan peranan hakim dalam memutus suatu perkara didalam hal undang - undang tidak dapat dilihat (dipedomani ) sebagai sumber tertinggi dari

keadilan yang terkandung dalam pasal 1388 ayat ( 1 ) BW, dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan.

- b. Upaya perlindungan untuk para nasabah (debitor) peminjam kredit bank adalah dapat melauai peran serta pemerintah dengan cara melakukan pengawasan terhadap bank - bank pemerintah atau bank - bank swasta dalam pembuatan perjanjian baku atau perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut harus mendapat izin dari Bank Indonesia yang dimana Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selain itu peranan - peranan para sarjana -sarjana dan para hakim diperlukan dalam menemukan kaidahnya dan menuangkan kaidah tersebut dalam putusannya sehingga dapat menjadi jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tersebut akan menjadi panutan atau tuntutan atau pedoman dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan. Dengan adanya jurisprudensi tersebut maka digunakan untuk melindungi pihak debitor (yang berkedudukan lemah ) dalam mengadakan pembatasan - pembatasan untuk kebebasan berkontrak.

## 2. Saran

- a. Penggunaan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku hendaknya lebih diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hal ini guna mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari bank-bank dalam menentukan isi dari perjanjian kredit.
- b. Hendaknya pengaturan mengenai perjanjian baku dan penggunaan syarat - syarat umum didalam undang-undang tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan